

**PERAN PEMERINTAH DAN MODAL SOSIAL TERHADAP
KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA MISKIN DI KECAMATAN
GEROKGAK KABUPATEN BULELENG**

**I Gusti Ngurah Agung Sukrisna¹
I Ketut Sudibia²
I Gde Sudjana Budiasa³**

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: agung_eet@yahoo.co.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah :Untuk menganalisis pengaruh peran pemerintah dan modal sosial terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin yang ada di kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng pada 40 kepala rumah tangga miskin ,dimana masing-masing desa diambil beberapa sampel sesuai jumlah populasi rumah tangga miskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif yang dilengkapi dengan dukungan hal-hal yang bersifat diskritif dan kualitatif . Setelah dianalisis dengan menggunakan teknik analisis SEM PLS maka dapat disimpulkan : 1) Ada pengaruh peran pemerintah positif dan signifikan terhadap norma modal sosial, 2) Ada pengaruh peran pemerintah positif dan signifikan terhadap jaringan sosial modal sosial,3) Ada pengaruh peran pemerintah positif dan signifikan terhadap kepercayaan modal sosial, 4) Ada pengaruh norma modal sosial positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin,5) Ada pengaruh jaringan modal sosial positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin,6) Ada mediasi pada peran pemerintah terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin.melalui konstruk norma modal sosial, 7) Ada mediasi pada peran pemerintah terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin.melalui konstruk jaringan modal sosial.
Kata kunci : Peran pemerintah, , modal sosial, kesejahteraan,rumah tangga miskin

ABSTRACT

The aims of this study are to analyze the effect of the government's role and social capital toward the welfare of poor households in district of Gerokgak, Buleleng regency. This research was conducted in the district of Gerokgak, Buleleng regency on the 40 heads of poor households, where each village was taken some samples according to the population of poor households. This study uses a quantitative analysis approach that are supported by diskritif and qualitative things. After analyzed by using PLS SEM analysis . It is concluded that :(1) There is a positive and significant influence of the government's role toward the norms of social capital, 2) There is a positive and significant influence of the government's role toward the social networks of social capital, 3) There is positive and significant government influence toward the trust of social capital, 4) There is positive and significant impact of norms of social capital on the welfare of poor households, 5) There is positive and significant influence of networks of social capital toward the welfare of poor households, 6) There is a mediation on the role of government to the welfare of poor households through the constructs norms of social capital, 7) There is mediation on the role of government toward the welfare of poor households through the construct of social capital networks.

Keywords: The role of government, social capital, welfare, poor households.

PENDAHULUAN

Masalah rumah tangga miskin (RTM) telah lama menjadi ganjalan bagi sebuah proses pembangunan perekonomian di berbagai Negara, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang berhasil ditingkatkan, ternyata tidak secara otomatis dibarengi dengan semakin membaiknya pemerataan pendapatan. Kuznet (1955) berkeyakinan bahwa proses pembangunan ekonomi akan menjadi timpang pada awal pembangunan ekonomi, serta menjadi semakin merata sejalan dengan proses pembangunan yang menghasikan pembentukan dan pemerataan yang semakin baik.

Kemiskinan merupakan persoalan pembangunan yang dihadapi di setiap wilayah di dunia. Tingginya angka kemiskinan di dunia mengundang perhatian dunia untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dunia. Karakteristik kemiskinan yang bersifat multidimensional menuntut langkah-langkah penanggulangan kemiskinan yang sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Penanggulangan kemiskinan yang sistematis, komprehensif, dan terpadu memerlukan koordinasi yang harmonis yang bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan secara berkesinambungan.

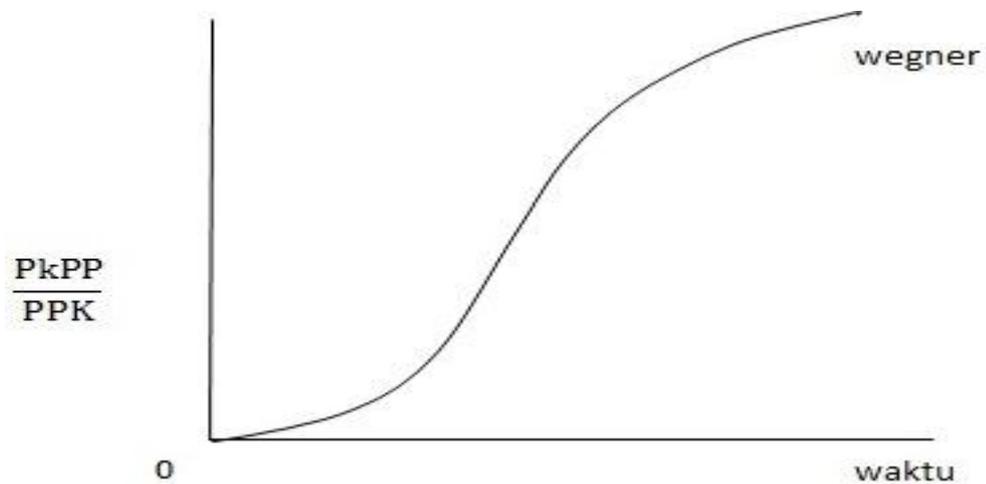
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Gerokgak , yang berbatasan langsung dengan wilayah Gilimanuk dengan arus mobilitas penduduk dari Jawa Timur melalui pelabuhan Ketapang menyeberang ke Gilimanuk dan menetap di wilayah Kecamatan Gerokgak. Penelitian ini menjadi strategis dan penting untuk dikaji, dengan tujuan agar dapat dipetakan pola dan dinamika

persaingan dalam mendapatkan sumber daya produksi yang terbatas, melalui persaingan antara penduduk pendatang dengan penduduk lokal. Pemetaan tentang potensi modal sosial juga diharapkan menjadi bermanfaat pada masa yang akan datang, sebagai parameter untuk melihat apakah kebersamaan modal sosial RTM menjadi semakin melemah, atau menguat bersamaan dengan dinamika tingkat persaingan antara penduduk pendatang dengan penduduk lokal.

Peran Pemerintah, Ekonom Jerman Aldoph Wagner (1835-1917) dengan rumusnya yang dikenal sebagai Hukum Wagner, menyatakan bahwa “ukuran pemerintah (size of government) yang diukur oleh pengeluaran publik meningkat secara proposional lebih besar dari pertumbuhan pendapatan nasional”. Hukum Wagner didasari oleh kecenderungan umum untuk ukuran pemerintah yang tumbuh, yaitu (1) peningkatan permintaan untuk belanja public, (2) peningkatan penyediaan penerimaan pajak, (3) dan alasan politik-ekonomi, termasuk perpanjangan/perluasan waralaba suara serta munculnya kelompok-kelompok berkepentingan. Secara umum dapat dilihat, bahwa terjadi peningkatan pengeluaran publik pada negara-negara sepanjang abad 20

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap PDB. Wegner mengemukakan pendapatnya bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum Wagner, sebagai berikut : Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan “ *The Law of Expanding State Expenditure*”.

Selain itu, penggambaran teori Wagner juga dapat diilustrasikan pada gambar 1 Dimana kenaikan pemerintah memiliki hubungan eksponensial.



Gambar 1
Grafik Pengeluaran Pemerintah menurut Wegner

Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Formulasi hukum Wagner ialah sebagai berikut :

$$\frac{PkPP1}{PP} < \frac{PkPP}{PP} < \dots < \frac{PkPP}{PP}$$

PkPP : Pengeluaran Pemerintah Perkapita

PPk : Pendapatan Perkapita

1,2,3,...,n : Jangka Waktu (Tahun)

Dasar hukum tersebut adalah pengamatan empiris di negara-negara maju yaitu, Amerika Serikat, Jerman, Jepang. Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan timbal balik dalam masyarakat.

Peningkatan pendapatan akan membuat orang lebih memperhatikan serta mengurangi dampak negative dari eksternalitas negatif. Air bersih dan udara

bersih menjadi sangat penting. Penyelesaian eksternalitas negative dipahami sangat penting karena terkait dengan kualitas hidup. Orang juga akan mencari perlindungan akan eksternalitas kejahatan dan pelecehan pribadi. Semuanya didapatkan dari pemerintah sebagai regulator dan stabilitator.

Asuransi Sosial dan Pemberian Hak

Pemberian hak asuransi sosial meningkatkan pengeluaran publik. Ada lebih banyak asuransi yang menjamin ketika seseorang mempunyai pendapatan lebih tinggi dan kaya sehingga lebih banyak resiko kerugian personal pada orang kaya menjadi lebih sedikit dan hilang. Hal ini tidak lepas dari preferensi masyarakatan pentingnya segala hal yang berhubungan dengan keselamatan diri sertakaitannya dengan kejadian yang tak terduga. Dilain pihak, orang-orang miskin tentu menginginkan adanya kesetaraan dan kesejahteraan sosial yang lebih. Dapat diasumsikan, adanya modernisasi yang terjadi di dunia ini membuka kesadaran mereka untuk menghargai diri lebih baik.

Demografi, Kesehatan, dan Transfer Pendapatan Ke Orang Tua

Demografi dan kesehatan memperngaruhi ukuran pemerintah. Karena terjadi kenaikan pendapatan perkapita pada masyarakat, maka konsumsi akan barang atau jasa untuk keamanan mereka semakin meningkat. Adanya kesempatan akibat kenaikan pendapatan dalam memperoleh akses gizi maupun fasilitas kesehatan yang lebih baik menyebabkan peningkatan kesehatan pada masyarakat. Perbaikan pada kesehatan pada masyarakat ini menghasilkan orang-orang yang hidup lebih lama (karena angka harapan hidup mereka menjadimeningkat). Hingga akhirnya, meningkatnya jumlah orang yang mampu

bertahan hidup sampai usia pensiun menuntut pemberian hak oleh pemerintah berupa kepastian bahwa orang-orang tua hidup dengan martabat. Tak jarang ditemui, dinegara-negara maju atau bahkan di kehidupan yang lebih modern, hak-hak orang tua akan diabaikan oleh keluarganya karena alasan kesibukan. Maka orang-orang tua ini harus meminta kepada pemerintah untuk penjaminan hak mereka agar bisa hidup lebih baik dan bermartabat. Salah satunya adalah permintaan akan layanan kesehatan umum khusus manula serta wadah atau tempat khusus mereka agar mereka mampu mengekspresikan kehidupan tua mereka.

Paternalisme dan Regulasi

Permintaan akan kebijakan paternalistik dan regulasi meningkat dengan pendapatan. Hubungan paternalistik adalah hubungan keorngtuaan yang terjadi dari pemerintah sebagai orang tua yang menyediakan berbagai hal/pelayanan dengan masyarakat sebagai anaknya yang menuntut pelayanan. Dengan peningkatan pendapatan, orang-orang menjadi kurang mudah tertipu dan meminta perlindungan dari penipu. Disini pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih berbagai kebijakan paternalisme yang sesuai dengan standar hidup mereka yang semakin meningkat. Misalnya, peningkatan pendapatan dan tingkat pendidikan menjadikan seseorang lebih sadar akan pendidikan dan kesehatan.

Penawaran Pendapatan dan Pertumbuhan Pemerintah

Ketika pemerintah tumbuh karena pengaruh dari sisi permintaan dan pemerintah merespon dengan murah hati (tanpa adanya politik principal-agent dan

masalah birokrasi), maka manfaat dapat ditarik dari respon pemerintah terhadap permintaan untuk peningkatan pengeluaran publik. Hal itu membuat pemerintah untuk meningkatkan pendapatan mereka untuk tanggung jawab penyediaan barang publik kepada masyarakat. Namun, adanya dasar pengenaan pajak dan kurva Laffer membatasi pasokan penerimaan pajak dan menghambat pertumbuhan pemerintah –seperti halnya penggelapan pajak. Selain itu, masalah politik, birokrasi agent-principal, dan ilusi fiskal akan membuat pemerintah bisa menghabiskan lebih banyak daripada yang diharapkan *voters* dan wajib pajak dan bisa memilih pengeluaran dari *voters* dan wajib pajak yang tidak menguntungkan mereka. Ketika pemerintah tumbuh karena pasokan peningkatan penerimaan pajak, ada lebih banyak sikap mendua tentang manfaat social dari pada ketika pemerintah tumbuh karena peningkatan permintaan pemilihan dan pembayar pajak untuk belanja publik.

Barton (2000) menyebutkan peran utama pemerintah secara garis besar adalah: 1) peran alokasi sumber daya, 2) peran regulator, 3) peran kesejahteraan sosial, 4) peran mengelola ekonomi makro. Penjelasan keempat peran pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam peran alokasi sumber daya tercakup soal penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian (keseimbangan sektor publik dan sektor swasta) dan penyediaan barang-barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
2. Peran regulator. Hal ini mencakup undang-undang dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat termasuk undang-undang yang mengatur dunia

bisnis yang memadai untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak-hak kepemilikan pribadi.

3. Peran kesejahteraan sosial. Mencakup kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerataan sosial di negara yang bersangkutan seperti perpajakan, jaminan sosial (*transfer payment*) dan penyediaan sejumlah barang publik campuran bagi masyarakat.
4. Peran mengelola ekonomi makro yang memfasilitasi stabilitas secara umum dan kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan-kebijakan yang didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, *full employment*, inflasi yang rendah, dan stabilitas neraca pembayaran.

Peran Norma Modal Sosial

Norma Modal sosial adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Pendapat Fukuyama (2001), bahwa norma modal sosial terbentuk melalui tradisi, sejarah, tokoh kharismatik bukan diciptakan oleh birokrat atau pemerintah. Norma modal sosial terbangun oleh suatu tatanan perilaku seseorang atau kelompok masyarakat, didalamnya kemudian akan timbul modal sosial secara alami dalam kerangka menentukan tata aturan yang dapat mengatur kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Liu *et. al*(2014) menyatakan tingkah laku modal sosial penduduk secara langsung digambarkan melalui norma, nilai dan aturan yang berlaku dalam kelompok masyarakat tersebut.

Hasbullah (2006) yang mengetengahkan enam unsur pokok dalam modal sosial berdasarkan berbagai pengertian modal sosial yang telah ada, yaitu: (1) *participation in a network*: kemampuan sekelompok orang untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial, melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas dasar prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan keadaban (*civility*), (2) *reciprocity*: Kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri tanpa mengharapkan imbalan, (3) Kepercayaan */trust*: merupakan suatu bentuk hasrat atau keinginan dalam mengambil resiko pada hubungan-hubungan sosialnya perasaan saling percaya bahwa yang lain akan melakukan sesuatu yang sama seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam yang didasari atas suatu pola tindakan yang saling mendukung, (4) *social norms*: Sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu, (5) *values*: Sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat, dan (6) *proactive action*: Keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan anggota kelompok dalam suatu kegiatan masyarakat.

Peran Jaringan Modal Sosial

Salah satu aspek dalam modal sosial adalah jaringan modal sosial, menurut J. Mawardi (2007) mengatakan bahwa modal sosial terbangun atas kecendrungan tumbuh pada suatu kelompok dalam rangka bersosialisasi yang merupakan bagian penting dari nilai-nilai yang melekat dan tidak dibangun oleh satu individu. Suatu

tipologi yang khas sejalan dengan karakteristik dan orientasi kelompok merupakan cerminan dari jaringan modal sosial. Atas dasar kesamaan garis turun temurun dan kesamaan kepercayaan pada dimensi kebutuhan yang membentuk pada kelompok sosial secara tradisional yang cenderung memiliki kohesif tinggi sehingga rentang jaringan maupun kepercayaan terbangun sangat sempit.

Peran Kepercayaan Modal Sosial

Kepercayaan dalam modal sosial merupakan suatu bentuk hasrat atau keinginan dalam mengambil resiko pada hubungan sosialnya didasari atas persamaan keyakinan berbuat sama yang diharapkan dan senantiasa bertindak saling mendukung tanpa merugikan diri dan kelompoknya (Putnam, 1995). Begitu juga Pretty dan Ward (2001), berpendapat bahwa terdapat dua macam kepercayaan pada modal sosial : kepercayaan terhadap individu atau seseorang yang kita mengenalnya, dan kepercayaan terhadap orang atau individu yang kita tidak tahu, namun akan meningkat karena kenyamanan kita dalam pengetahuan struktur sosial. Saling percaya terhadap yang lain dalam sebuah komunitas memiliki harapan yang lebih untuk dapat berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan lingkungan (Liu et. Al (2014); Krishhna dan Uphoff, (1999); Jones (2005, 2010); Pretty dan Ward (2001).

Pranadji (2006) melihat tata nilai yang ada dalam masyarakat melalui empat elemen nilai komposit, yaitu:

1. Ditegakkannya sistem sosial di perdesaan yang berdaya saing tinggi (produktif) namun berwajah humanistik tidak eksploitatif dan intimidatif terhadap sesama manusia atau masyarakat;

2. Ditegakkannya sistem keadilan yang dilandaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia (tidak imperialistik dan menegasi kehidupan sosial);
3. Ditegakkannya sistem solidaritas yang dilandaskan pada hubungan saling percaya (*mutual trust*) antar elemen pembentuk sistem masyarakat; dan
4. Dikembangkannya peluang untuk mewujudkan tingkat kemandirian dan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang relatif tinggi, yang merupakan salah satu bagian terpenting keberadaan suatu masyarakat.

Pendapat Pranadji tersebut mendukung konsep Fukuyama (2002) bahwa kepercayaan adalah dasar dari tatanan sosial yaitu komunitas tergantung pada kepercayaan timbal balik dan tidak akan muncul spontan.

Melakukan penelitian hubungan antara institusional sosial , modal sosial dan penelitian tersebut menganalisis institusional sosial ,modal sosial dan hubungan antara keduanya serta pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan.

Kerangka konseptual untuk menganalisis pengaruh modal sosial pada kesejahteraan rumah tangga yang diukur melalui pengeluaran perkapita rumah tangga sama halnya dengan modal lainnya. Modal Sosial bersama-sama dengan modal manusia ,modal finansial ,dan modal lainnya digunakan dalam kegiatan produksi dirumah tangga untuk menghasilkan pendapatan.

Penelitian ini menerapkan kerangka analisis yang digunakan oleh Grootaert (2001)) Model Kovenasionalprilaku ekonomi rumah tangga maksimali utilitas ,yang menghubungkan tingkat pengeluaran rumah tangga (indikator kesejahteraan)dengan kepemilikan aset ,variabel sosial,dan variabel ekonomi.

Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin

Menurut Strauss, (2004:63), pengertian kesejahteraan dilihat dari dua pendekatan, yakni: kesejahteraan objektif dan kesejahteraan subjektif. Milligan et al(2006:22), melihat bahwa kesejahteraan objektif adalah tingkat kesejahteraan individu atau kelompok masyarakat yang diukur secara rata-rata dengan patokan tertentu baik ukuran ekonomi, sosial maupun ukuran lainnya. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan pendekatan yang baku (tingkat kesejahteraan masyarakat semuanya dianggap sama), sedangkan kesejahteraan subjektif adalah tingkat kesejahteraan seorang individu yang dilihat secara personal yang diukur dalam bentuk kepuasan dan kebahagiaan.

Selanjutnya Supriatna (1997:82) mengemukakan adanya lima karakteristik penduduk miskin. Lima karakteristik penduduk miskin itu antara lain: 1) faktor produksi sendiri tidak ada , 2) kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri tidak dimiliki , 3) Pada umumnya tingkat pendidikan rendah, 4) tidak adanya fasilitas pendukung, dan 5) Keterampilan atau pendidikan yang begitu rendah dan usia yang masih muda.

Booth dan Me Cawley (Dalam Moeljarto T., 1993) menyatakan bahwa "di banyak negara memang terjadi kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapitanya, tetapi itu hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakatnya, sedangkan sebagian besar masyarakat miskin kurang memperoleh manfaat apa-apa, bahkan sangat dirugikan".

Dalam mengatasi suatu permasalahan diperlukan suatu kebijakan yang tepat guna mengidentifikasi kelompok masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan berbagai karakteristiknya. Terbatasnya aspek primer itu

meliputi terbatasnya pengetahuan dan keterampilan diri , sedangkan aspek sekunder tidak adanya dukungan jaringan sosial,sumber keuangan,dan ketersediaan fasilitas informal lainnya seperti adanya gizi kurang ,sarana air bersih ,perumahan,pemenuhan kesehatan yang kurang memadai dan akses pendidikan yang relatif rendah.

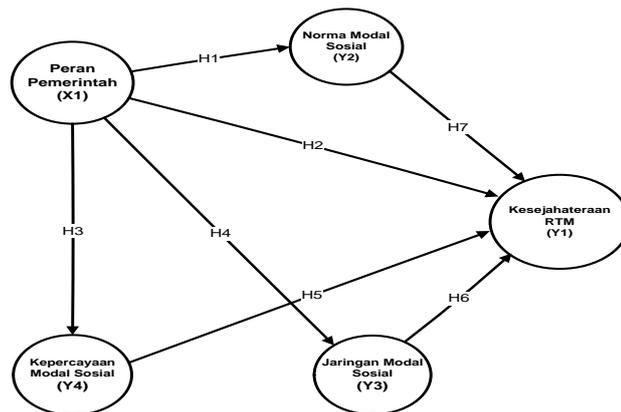
Begitu banyak penjelasan tentang sebab- sebab terjadinya kemiskinan, Kemiskinan massal terjadi pada beberapa negara yang baru meraih kemerdekaanya. Pada Perang Dunia II mengkerucut pada keterbelakangan dari perekonomian negara tersebut sebagai inti dari permasalahannya Mudrajat Kuncoro (1997:131). Penduduk suatu negara dikatakan miskin menurut kuncoro(1997:131) karena menggantungkan diri penuh pada sektor pertanian yang begitu subsistem,metode pertanian yang tidak moderen dan sering diikuti dengan sikap apatis terhadap lingkungan sekitar.

METODE PENELITIAN

KERANGKA KONSEP PENELITIAN

Peran pembangunan daerah yang dimulai dari tahap identifikasi rumah tangga miskin mencakup karakteristik geografik (pegunungan dan dataranrendah, serta karakter demograpi mencakup umur, pendidikan, jenis kelamin dan mata pencaharian) adalah proses awal pendataan, untuk kemudian ditindak-lanjuti dengan dukungan informasi lainnya. Dalam rangka pengembangan informasi yang bersifat akademik dan berbasis pengembangan model penelitian, maka kegiatan penelitian ini melakukan upaya mengkonstruksi peran pemerintah (*government policy*) sebagai *policy variable* yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan, serta konstruksi modal sosial yang

diajukan penelitian ini sebagai kerangka model; pendekatan yang ditawarkan dalam rangka memecahkan persoalan kemiskinan dari dalam diri rumah tangga miskin tersebut. (gambar 2).



Gambar 2
Kerangka Konsep Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dan kajian pustaka yang terangkum dalam kerangka konsep penelitian, maka hipotesis yang diajukan berkenaan dengan pengaruh input peran pemerintah dan potensi modal sosial terhadap kesejahteraan masyarakat rumah tangga miskin di Kecamatan Gerokgak adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa peran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap norma modal sosial.
- 2) Bahwa peran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin
- 3) Bahwa peran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan modal sosial
- 4) Bahwa peran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap jaringan modal sosial

- 5) Bahwa kepercayaan modal sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin
- 6) Bahwajaringan modal sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin
- 7) Bahwa kepercayaan modal sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin

RUANG LINGKUP PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di empat belas desa di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Lokasi ini dipilih karena, (a) wilayah kecamatan Gerokgak memiliki jumlah RTM terbesar dibandingkan dengan delapan kecamatan lainnya, rumah tangga miskin untuk ditingkat kecamatan, Kecamatan Gerokgak memiliki jumlah rumah tangga miskin yang paling tinggi di bandingkan dengan kecamatan yang lain sejumlah 9.944 rumah tangga miskin yang menjadikan Kecamatan Gerokgak sebagai kecamatan yang memiliki rumahtangga miskin terbanyak(b) kecamatan Gerokgak merupakan daerah perbatasan dengan jumlah rumah tangga miskin yang penduduknya cukup heterogendengan bentangan wilayah cukup luas. Waktu penelitian ,khususnya pada kegiatan pengambilan data dilakukan selama 3 bulan yaitu pada periode Januari – Maret 2016, pada 2 bulan pertama digunakan untuk mengumpulkan informasi kuesioner dan bulan ketiga digunakan untuk mengumpulkan hasil wawancara.

JENIS DAN SUMBER DATA

- 1) Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka dan penghitungan statistik dan data kualitatif, yaitu data yang berupa pernyataan responden dan pertanyaan yang diberikan dalam bentuk kuesioner.
- 2) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a) Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara). Data primer yang diperoleh adalah hasil wawancara mendalam mencari informan kunci yang berasal dari rumah tangga miskin.
 - b) Data sekunder adalah data yang diperoleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yaitu Basis Data Terpadu PPLS 2015

VARIABEL PENELITIAN

1. Peran pemerintah yang merupakan variabel eksogen adalah kemampuan pemerintah yang mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan benar atau valid terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin.
2. Kesejahteraan rumah tangga miskin merupakan variabel endogen adalah merupakan konsep yang digunakan untuk menyatakan kualitas hidup suatu masyarakat atau individu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.
3. Norma modal sosial merupakan variabel endogen adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu.

4. Jaringan modal sosial merupakan modal sosial yang tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat.
5. Kepercayaan (*trust*) modal sosial adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya.

POPULASI, SAMPEL DAN METODE PENENTUAN SAMPEL

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah RTM . Tabel 1 menyajikan jumlah populasi dan sampel rumah tangga miskin di wilayah Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Populasi dan Sampel Rumah Tangga Miskin

No	Desa	Populasi	Sampel
1	Sumber Kelampok	249	1
2	Pejarakan	1187	5
3	Sumberkima	1079	4
4	Pemuteran	987	4
5	Banyupoh	133	1
6	Penyabangan	613	2
7	Musi	474	2
8	Sanggalangit	631	3
9	Gerokgak	767	3
10	Patas	1324	5
11	Pengulon	459	2
12	Tinga Tinga	612	2
13	Celukan Bawang	438	2

14	Tukad Sumaga	919	4
	Kecamatan	9.944	40
<hr/>			
Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng			

Sumber : TNP2K

Studi penelitian ini melakukan prediksi atas karakter rumah tangga miskin dengan mempergunakan metode SEM PLS . Henseler et al (2010) merekomendasikan penarikan jumlah sampel antara 40 sampai dengan 100 .penelitian ini mempergunakan jumlah seluruh sampel sebesar 40.

METODE PENGUMPULAN DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Dikumpulkan dengan cara meminta informasi pada instansi yang berwenang dalam hal ini Bappeda selaku sekretaris TKPKD Kabupaten Buleleng (Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Daerah). Data yang kami peroleh merupakan berupa Basis Data Terpadu (BDT) PPLS 2015. Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama & alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu

berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program.

TEKNIK ANALISIS DATA

Berdasarkan data yang terkumpul sesuai konsep pemikiran awal maka akan dilanjutkan dengan proses analisis. Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan PLS (*Partial Least Squares*). Proses analisisnya dilakukan dengan program PLS. Model persamaan dalam penelitian ini adalah :

$$\begin{aligned}
 1. \quad Y_1 &= \alpha_1 + \beta_1 Y_2 + \beta_2 X_1 + \beta_3 Y_4 + \beta_4 Y_3 + e_1 \dots\dots\dots(1) \\
 2. \quad Y_2 &= \alpha_1 + \beta_5 X_1 + e_2 \dots\dots\dots(2) \\
 3. \quad Y_4 &= \alpha_1 + \beta_6 X_1 + e_3 \dots\dots\dots(3) \\
 4. \quad Y_3 &= \alpha_1 + \beta_7 X_1 + e_4 \dots\dots\dots(4)
 \end{aligned}$$

Keterangan

- Y1 = Kesejahteraan RTM
- Y2 = Norma
- Y3 = Network Quality
- Y4 = Trust
- X1 = Peran Pemerintah
- β_{1-2} = Koefisien regresi yang menunjukkan variasi pada variable terikat sebagai akibat perubahan pada variable bebas.
- α = intersep
- e = eror term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Dengan Menggunakan Acuan Henseler (2010) merekomendasikan penarikan sampel sejumlah 40 -100 responden Jumlah kuisioner yang disebarkan sebanyak 40 dimana masing-masing desa diambil sesuai dengan populasi rumah tangga miskin yang tersebar di Kecamatan Gerokgak.

Karakteristik Responden Umur Kepala Rumah Tangga Miskin

Penelitian ini telah berhasil mengumpulkan sebanyak 40 responden yang tersebar pada 14 Desa di Kecamatan Gerokgak . Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebelum sampai kepada prosedur pengujian statistic outer-model dan inner-model .Hasil analisis kuantitatif yang akan didapatkan pada tahap pengolahan data berikutnya. Hasil identifikasi data sample penelitian yang diperoleh dari 40 responden disajikan pada Tabel 2

Tabel 2
Karakteristik Data Sample Penelitian Umur Kepala RTM
di Kecamatan Gerokgak

Karakteristik	Jumlah Responden	Persen
15-25 tahun	2	5
26-35 tahun	7	17.5
36-45 tahun	11	27.5
46-55 tahun	14	35
Lebih dari 55 tahun	6	15
Total	40	100

Sumber: Hasil Penelitian,2016

Karakteristik Responden Pendidikan Kepala Rumah Tangga Miskin

Tingkat pendidikan dari 40 responden kepala rumah tangga miskin menyebutkan bahwasannya kepala keluarga yang tidak bersekolah sebanyak 19 kepala keluarga atau 47.5 persenyang paling dominan, kemudian disusul kepala keluarga yang tamat SD sebanyak 17 kepala keluarga atau 42.5 persen dan kepala keluarga tamat SMP sebanyak 4 kepala keluarga atau 10 persen dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3
Karakteristik Data Sample Penelitian PendidikanKepala RTM
di Kecamatan Gerokgak

Karakteristik	Jumlah Responden	Persen
Tidak Sekolah	19	47.5
Tamat SD	17	42.5
Tamat SMP	4	10
Total	40	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2016

Karakteristik Responden Jumlah Tanggungan Kepala Rumah Tangga Miskin

Pada responden dengan Jumlah tanggungan keluarga kepala rumah tangga miskin yang mempunyai tanggungan 3 orang sejumlah 13 kepala keluarga atau 32.5 persen sama dengan jumlah keluarga yang mempunyai tanggungan 4 orang yaitu 32.5 persen. Kemudian disusul oleh kepala rumah tangga miskin yang mempunyai tanggungan 5 orang sebanyak 6 kepala keluarga atau 15 persen. Sedangkan yang mempunyai tanggungan keluarga 2 orang dengan sebanyak 5 kepala keluarga atau 12.5 persen dan kepala rumah tangga miskin dengan tanggungan 6 sebanyak 3 kepala keluarga atau 7.5 persen, dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 4
Karakteristik Data Sample Penelitian Jumlah Tanggungan Kepala RTMdi Kecamatan Gerokgak

Karakteristik	Jumlah Responden	Percent
Jumlah tanggungan 2	5	12.5
Jumlah tanggungan 3	13	32.5
Jumlah tanggungan 4	13	32.5
Jumlah tanggungan 5	6	15
Jumlah tanggungan 6	3	7.5
Total	40	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2016

Karakteristik Responden Kepemilikan Lahan pada Kepala Rumah Tangga Miskin

Responden kepala keluarga rumah tangga miskin pada tabel kepemilikan lahan pada rumah tangga miskin yang tidak mempunyai lahan sebanyak 25 kepala keluarga rumah tangga miskin atau 62.5 persen sedangkan kepala keluarga

rumah tangga miskin yang mempunyai lahan sebanyak 15 kepala keluarga rumah tangga miskin atau sekitar 37.5 persen dapat dilihat pada Tabel 5

Tabel 5
Karakteristik Data Sample Penelitian Kepemilikan Lahan Kepala RTM di Kecamatan Gerokgak

Karakteristik	Jumlah responden	Persen
Kepemilikan Lahan		
Tidak Punya Lahan	25	62.5
Punya Lahan	15	37.5
Total	40	100

Sumber :Hasil Penelitian,2016

Karakteristik Responden Pekerjaan pada Kepala Rumah Tangga Miskin

Responden kepala keluarga rumah tangga miskin pada tabel pekerjaan pada rumah tangga miskin yang mempunyai bekerja sebagai buruh sebanyak 5 kepala keluarga atau 12,5 persen , bekerja sebagai tani 20 kepala keluarga rumah tangga miskin atau sekitar 50 persen ,dan sebagai peternak 15 kepala keluarga rumah tangga miskin atau sekitar 37.5 persen dapat dilihatpada Tabel 6

Tabel 6
Karakteristik Data Sample Penelitian Pekerjaan KepalaRTM di Kecamatan Gerokgak

Karakteristik	Jumlah Responden	Persen
Pekerjaan		
Buruh	5	12.5
Tani	20	50
Peternak	15	37.5
Total	40	100

Sumber : Hasil Penelitian 2016

UJI INSTRUMEN

Penelitian ini menetapkan sejumlah langkah pengujian statistik yaitu dengan mempergunakan uji statistik reliabilitas dan validitas dengan bantuan paket *software SPSS 22*. Untuk uji reliabilitas dipergunakan uji statistik Cronbach Alpha yaitu dengan melakukan pengujian konsistensi internal dari instrumen penelitian yang dipergunakan. Dinyatakan instrumen penelitian adalah reliabel apabila memiliki nilai *Alpha Cronbach* minimal 0.60 untuk ilmu-ilmu social (Nunnally dan Bernstein, 1994).

Jika hasil analisis mendapatkan nilai KMO paling sedikit atau lebih dari 0.70, maka dinyatakan instrumen penelitian adalah valid serta sebaran data dinyatakan bersumber dari *multivariate normal distribution* (Tabachnick dan Fidell, 2001). Berdasarkan hasil analisis dari 20 responden yang telah diwawancarai, didapatkan uji Cronbach Alpha dan uji KMO yang disajikan pada Tabel 7

Tabel 7

Ringkasan Uji Reliabilitas dan Validitas Indikator pada Dimensi

	Dimensi	Cronbach's Alpha	Ket.	Nilai KMO MSA	Ket.
Peran Pemerintah	X1	0.956	Reliabel	0.866	Valid
Kesejahteraan	Y1	0.981	Reliabel	0.840	Valid
Norma	Y.2	0.962	Reliabel	0.837	Valid
Jaringan Sosial	Y3	0.975	Reliabel	0.869	Valid
Kepercayaan	Y4	0.946	Reliabel	0.730	Valid

Sumber: Lampiran 2

UJI KONSTRUK *OUTER-MODEL*

Penelitian ini melakukan pengujian data sample penelitian dengan jumlah responden sebanyak 40. Berdasarkan hasil perhitungan dengan memanfaatkan software Smartpls 3 diperoleh hasil analisis. Berdasarkan Tabel 8 didapatkan

sebaran nilai CR dan Cronbach Alpha, dengan sebaran nilai Cronbch Alpha paling rendah 0.957 dan tertinggi sebesar 0.980, sehingga masih lebih besar dari 0.70, maka dinyatakan instrument penelitian adalah reliable.

Tabel 8
Uji Reabilitas Instrumen Penelitian

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
X1	0.962	0.975	0.930
Y1	0.980	0.983	0.908
Y2	0.969	0.977	0.915
Y3	0.973	0.980	0.925
Y4	0.957	0.972	0.922

Sumber: lampiran 3

Prosedur lain yang dipergunakan untuk menguji reabilitas instrument penelitian adalah dengan metode composite realibility yang juga didapatkan lebih besar dari 0.70, sehingga dinyatakan reliable. Bahwa ketentuan minimal AVE sebesar 0.50 untuk melihat kualitas instrument menunjukkan seluruh konstruk memiliki nilai AVE paling rendah 0.908, sehingga dapat diyakini bahwa instrument penelitian ini adalah reliable.

Ternyata nilai AVE untuk konstruk X1 sebesar 0.964 dengan cross-correlation secara diagonal yaitu cross-coorelation X1 dengan sebaran nilai yang berada dibawahnya, menunjukkan bahwa nilai AVE dari X1 masih lebih besar dari cross-coorelation dari konstruk

PENGUJIAN *INNER-MODEL* PENELITIAN

Penelitian ini telah berhasil meningkatkan analisis data dari outer-model ke inner-model, yaitu dengan mengkaitkan relasi antar konstruk sesuai dengan model yang telah dijabarkan pada kerangka operasional penelitian. Berdasarkan

Tabel 9 dapat dinyatakan bahwa sebanyak lima dari tujuh tujuan penelitian ini dapat didukung untuk diteruskan menjadi rekomendasi Penelitian.

Tabel 9
Hasil Analisis Path Coefficient Dan Signifikansi

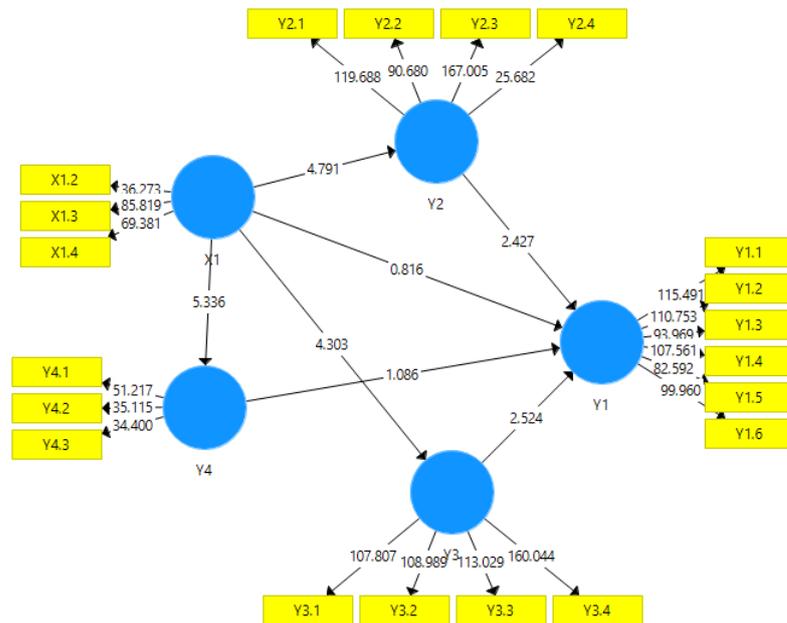
	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics	P Values	Keterangan
X1 -> Y1	0.041	0.039	0.050	0.816	0.207	Tdk Signifikan
X1 -> Y2	0.569	0.568	0.119	4.791	0.000	Signifikan
X1 -> Y3	0.568	0.564	0.132	4.303	0.000	Signifikan
X1 -> Y4	0.682	0.679	0.128	5.336	0.000	Signifikan
Y2 -> Y1	0.490	0.539	0.202	2.427	0.008	Signifikan
Y3 -> Y1	0.505	0.454	0.200	2.524	0.006	Signifikan
Y4 -> Y1	-0.045	-0.043	0.042	1.086	0.139	Tdk Signifikan

Sumber: Lampiran 6

dimana :

- X1 = Peran pemerintah
- Y1 = Kesejahteraan rumah tangga miskin
- Y2 = Norma
- Y3 = Jaringan atau *Network quality*
- Y4 = Kepercayaan atau *Trust*

Penelitian telah merumuskan sebanyak tujuh hipotesis penelitian, ternyata sebanyak dua tujuan penelitian tidak berhasil didapatkan signifikansi, yaitu relasi langsung antara kebijakan pemerintah (X1) dengan kesejahteraan rumah tangga miskin (Y1), serta hubungan pengaruh langsung dari trust (Y4) terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin (Y1). (lihat Gambar 5.1).



Gambar 3

Signifikansi dan analisis path

Kebijakan pemerintah (X1) yang tidak signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin (Y1) membuktikan bahwa pemerintah memerlukan mediasi yang diperlukan untuk membangun kesejahteraan rumah tangga miskin. Hasil analisis ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah menjadi efektif dan signifikan berpengaruh terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin (Y1) hanya dapat dilakukan melalui konstruk norma modal sosial Y2.

Penelitian ini menemukan model mediasi peran pemerintah terhadap pembentukan kesejahteraan rumah tangga miskin di Kecamatan Gerokgak sebagai full mediation, disebabkan karena direct effect dari kebijakan pemerintah dan kesejahteraan rumah tangga miskin yang ada di Kecamatan Gerokgak adalah tidak signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Peran Pemerintah terhadap Norma Modal Sosial di Kecamatan Gerokgak

Hasil hipotesis menunjukkan besarnya koefisien estimate dari peran pemerintah (X1) terhadap norma modal sosial (Y2) adalah positif sebesar 0.569 yang apabila peran pemerintah semakin ditingkatkan maka semakin besar pula penguatan atas norma modal sosial (Y2). Tujuan penelitian nomor 2, yaitu pengaruh peran pemerintah terhadap norma modal sosial (Y2) berhasil dijawab, dengan parameter prediksi sebesar 0.569. Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung sebesar 4.791 dengan p-value = 0.00 dengan. Dengan tingkat keyakinan 5%, didapatkan tabel t = 1.96. Ternyata nilai t dari hasil perhitungan adalah lebih besar dibandingkan dengan t tabel. Dengan demikian, pernyataan bahwa kebijakan pemerintah berdampak positif terhadap norma (Y2) dapat didukung penelitian ini.

Pengaruh Peran Pemerintah terhadap Jaringan Modal Sosial di Kecamatan Gerokgak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa peran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap jaringan modal sosial di Kecamatan Gerokgak dengan besar koefisien estimate dari peran pemerintah (X1) terhadap network quality atau jaringan modal sosial (Y3) adalah 0.568. Koefisien tersebut bertanda positif yang berarti bahwa semakin ditingkatkan kebijakan pemerintah maka semakin besar pula penguatan network quality rumah tangga miskin. Berdasarkan evaluasi uji statistik t, didapatkan nilai t sebesar 4.303 adalah lebih

besar dari tabel $t = 1.96$, yaitu dengan $p\text{-value} = 0.000$ membuktikan bahwa peran pemerintah adalah positif dan signifikan terhadap jaringan modal sosial atau network quality (Y3).

Dari indikator jaringan sosial menurut persepsi responden kepala rumah tangga miskin ditentukan oleh indikator (Y3.1) partisipasi dalam kegiatan kelompok diatas rata-rata sebesar 3.73 diatas rerata yang sebesar 3.59 ini menandakan bahwa partisipasi dalam kelompok padarumah tangga miskin di Kecamatan Gerokgak memiliki tingkat yang tinggi.

Pengaruh Peran Pemerintah terhadap Kepercayaan Modal Sosial di Kecamatan Gerokgak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan modal sosial di Kecamatan Gerokgak. Dengan besarnya koefisien estimate dari peran pemerintah (X1) terhadap kepercayaan modal sosial atau trust (Y4) adalah 0.682. Koefisien tersebut bertanda positif yang berarti bahwa semakin ditingkatkan peran pemerintah maka semakin besar pula penguatan trust atau kepercayaan modal sosial rumah tangga miskin. Berdasarkan evaluasi uji statistik t, didapatkan nilai t sebesar 5.336 adalah lebih besar dari tabel $t = 1.96$, yaitu dengan $p\text{-value} = 0.000$ membuktikan bahwa kebijakan pemerintah adalah positif dan signifikan terhadap kepercayaan atau trust modal sosial (Y4).

Indikator kepercayaan modal sosial pada (Y4.2) menurut persepsi kepentingan kelompok diatas kepentingan individu terbukti dari indikator tersebut dengan nilai diatas rerata sebesar 4.35 diatas rerata sebesar 4.31. Ini menandakan

bahwa indikator tersebut yang dirasakan oleh kepala rumah tangga miskin atau responden di Kecamatan Gerokgak.

Pengaruh Peran Norma Modal Sosial terhadap Kesejahteraan kepala rumah tangga miskin di Kecamatan Gerokgak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh norma modal sosial terhadap kesejahteraan kepala rumah tangga miskin positif dan signifikan di Kecamatan Gerokgak. Dengan koefisien estimate dari norma modal sosial (Y2) terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin (Y1) adalah 0.490. Koefisien tersebut bertanda positif yang berarti bahwa apabila norma modal sosial rumah tangga miskin menguat, akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin. Koefisien tersebut bertanda positif yang berarti bahwa semakin ditingkatkan norma modal sosial rumah tangga miskin maka semakin besar pula penguatan tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin (Y1). Berdasarkan evaluasi uji statistik t, didapatkan nilai t sebesar 2.427 adalah lebih besar dari tabel t = 1.96, yaitu dengan p-value = 0.000 membuktikan bahwa pengaruh norma modal sosial adalah positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin (Y1). Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka tujuan penelitian pengaruh norma modal sosial terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin di Kecamatan Gerokgak terjawab.

Pengaruh Peran Jaringan Modal Sosial terhadap Kesejahteraan Kepala rumah Tangga Miskin

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh jaringan modal sosial terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin di Kecamatan Gerokgak adalah positif dan signifikan di Kecamatan Gerokgak. Dari besarnya koefisien estimate dari network quality (Y3) terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin (Y1) adalah 0.505. Koefisien tersebut bertanda positif yang berarti bahwa apabila network quality atau jaringan modal sosial semakin dapat ditingkatkan maka semakin besar pula penguatan kesejahteraan rumah tangga miskin (Y1). Berdasarkan evaluasi uji statistik t, didapatkan nilai t sebesar 2.524 adalah lebih besar dari tabel $t = 1.96$, yaitu dengan $p\text{-value} = 0.000$ membuktikan bahwa network quality atau jaringan modal sosial adalah positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin (Y1) di Kecamatan Gerokgak

Norma Modal Sosial Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Gerokgak Sebagai Mediator Peran Pemerintah

Peran pemerintah (X1) yang tidak signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin (Y1) membuktikan bahwa pemerintah memerlukan mediasi yang diperlukan untuk membangun kesejahteraan rumah tangga miskin. Hasil analisis ini membuktikan bahwa peran pemerintah menjadi efektif dan signifikan berpengaruh terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin (Y1) hanya dapat dilakukan melalui konstruk norma modal sosial (Y2). Penelitian ini menemukan model mediasi peran pemerintah terhadap pembentukan kesejahteraan masyarakat sebagai *full mediation*, disebabkan karena *direct effect* dari kebijakan pemerintah dan kesejahteraan rumah tangga miskin adalah tidak signifikan

Peran Jaringan Modal Sosial sebagai Mediator Peran Pemerintah terhadap Kesejahteraan kepala rumah tangga miskin di Kecamatan Gerokgak

Hasil penelitian menunjukkan jaringan modal sosial kepala rumah tangga miskin di Kecamatan Gerokgak sebagai mediator peran pemerintah terhadap kesejahteraan kepala rumah tangga miskin dimana peran pemerintah (X1) yang tidak signifikan terhadap kesejahteraan (Y1) yang membuktikan bahwa pemerintah memerlukan mediasi yang diperlukan untuk membangun kesejahteraan rumah tangga miskin di Kecamatan Gerokgak. Hasil menunjukkan variabel peran pemerintah (X1) terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin (Y1) yang dimediasi oleh jaringan modal sosial dinyatakan sebagai *full mediation* oleh karena pengaruh langsung peran pemerintah (X1) terhadap kesejahteraan (Y1) tidak signifikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut.

- 1) Peran pemerintah terhadap norma modal sosial berpengaruh positif dan signifikan. Apabila peran pemerintah semakin ditingkatkan maka semakin besar pula penguatan atas norma modal sosial di Kecamatan Gerokgak.
- 2) Peran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap jaringan modal sosial di Kecamatan Gerokgak. Jika peran pemerintah ditingkatkan maka semakin besar pula penguatan network quality atau jaringan modal sosial rumah tangga miskin di Kecamatan Gerokgak. Ini membuktikan bahwa peran

pemerintah adalah positif dan signifikan terhadap jaringan modal sosial atau network quality .

- 3) Peran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan modal sosial di Kecamatan Gerokgak. Apabila peran pemerintah semakin ditingkatkan maka semakin besar pula penguatan trust atau kepercayaan pada kelompok rumah tangga miskin tersebut. Bahwa semakin ditingkatkan peran pemerintah maka semakin besar pula penguatan trust atau kepercayaan modal sosial rumah tangga miskin di Kecamatan Gerokgak.
- 4) Peran norma modal sosial terhadap kesejahteraan kepala rumah tangga miskin berpengaruh positif dan signifikan di Kecamatan Gerokgak. apabila norma modal sosial rumah tangga miskin ditingkatkan maka semakin besar pula penguatan tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin di Kecamatan Gerokgak.
- 5) Peran jaringan modal social terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin di Kecamatan Gerokgak adalah berpengaruh positif dan signifikan di Kecamatan Gerokgak. Bahwa apabila network quality atau jaringan modal sosial semakin ditingkatkan maka semakin besar pula penguatan kesejahteraan rumah tangga miskin di Kecamatan Gerokgak
- 6) Peran pemerintah tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Bahwa norma modal social pada rumah tangga miskin di Kecamatan Gerokgak memainkan peranan sangat penting dalam menjelaskan kesejahteraan rumah tangga miskin.

7) Hasil penelitian menunjukkan jaringan modal sosial kepala rumah tangga miskin di Kecamatan Gerokgak sebagai mediator peran pemerintah terhadap kesejahteraan kepala rumah tangga miskin dimana peran pemerintah (X1) yang tidak signifikan terhadap kesejahteraan (Y1) yang membuktikan bahwa pemerintah memerlukan mediasi yang diperlukan untuk membangun kesejahteraan rumah tangga miskin di Kecamatan Gerokgak . Hasil menunjukkan variable peran pemerintah (X1) terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin (Y1) yang dimediasi oleh jaringan modal sosial dinyatakan sebagai *full mediation* oleh karena pengaruh langsung peran pemerintah (X1) terhadap kesejahteraan (Y1) tidak signifikan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan dapat disampaikan saran sebagai berikut.

1. Perlu adanya peran dari pemerintahan Kabupaten Buleleng yang lebih dalam membangkitkan modal sosial yang berupa trust yang ada pada rumah tangga miskin di Kecamatan Gerokgak sehingga kesejahteraan dapat tercapai melalui pemberdayaan dirumah tangga miskin dengan peningkatan kerjasama dengan pihak terkait termasuk bantuan pembiayaan atau pendanaan dalam program atau kegiatan.
2. Perlu adanya pembinaan lebih serius dari pemerintah Kabupaten Buleleng guna membantu kelompok rumah tangga miskin di kecamatan Gerokgak dalam hal penguatan terhadap modal sosial yang ada dalam meningkatkan status

kesejahteraannya melalui kegiatan pada kelompok, serta membantu kelompok dalam mengolah dan memasarkan hasil usaha yang dimiliki.

3. Perlu adanya pembinaan dan pendampingan terhadap rumah tangga miskin dari pemerintah sebagai tindak lanjut dari kegiatan pada rumah tangga miskin yang telah dilaksanakan sehingga rumah tangga tidak hanya menerima ilmu yang didapat, tetapi juga mampu menerapkannya dalam bentuk usaha mandiri atau kelompok.
4. Diperlukan penelitian lebih lanjut yang berkenaan dengan modal sebagai penentu peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin , sehingga dapat lebih diketahui secara mendalam mengenai indikator-indikator modal sosial (*social capital*) yang menunjang kesejahteraan rumah tangga miskin

REFRENSI

- Ahmadrswan Nasution , Ernani Rustiadi, Bambang Juanda, Setia Hadi . 2014 . "Dampak Modal Sosial terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Perdesaan di Indonesia" *Mimbar* Vol.30 No.2 (Desember 2014); 137-148
- Arikunto, Suhaisimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badaruddin (2005). "Modal Sosial (Social Capital) dan Pemberdayaan Komunitas Nelayan", dalam M. Arief Nasution, Badaruddin, Subhilhar, (Editor). *Isu-isu Kelautan : Dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Barton, H., 2000. *Urban Form and Locality, Sustainable Communities: The Potential for eco-neighbourhoods*. London: Earthscan
- Bollen, K.A., Lennox, R., 1991. *Conventional wisdom on measurement: a structural equation perspective. Psychological Bulletin*
- Buleleng Dalam Angka , Buleleng Regency in Figures 2013 , Badan Statistik Kabupaten Buleleng
- Bungin Burhan, 2010, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Cahyono, B dan Adhiatma, A 2012. Peran Modal Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau di Kabupaten Wonosobo. Conference In Business, Accounting and Management (CBAM) 2012. Vol.1 No.1 Hal: 131-144.
- Cohen, D. & Prusak, L. 2001. *In Good Company*, Boston: Harvard Business School Press.
- Coleman, J.S. 1988. *Foundations of Social Theory*. Cambridge: Harvard University Press
- Cox, Eva. 1995. *A Truly Civil Society*. Sydney: ABC Books.
- Davey, Kenneth J. 1998. *Pembiayaan pemerintah daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Kerja*. Jakarta: UI Press
- Diamantopoulos, A., & Winklhofer, H. M. (2001). *Index construction with formative indicators: An alternative to scale development*. *Journal of Marketing Research*, 38(2), 269–277.
- Diamantopoulos, A., Riefler, P., & Roth, K. P. (2008). *Advancing formative measurement models*. *Journal of Business Research*, 61(12), 1203–1218.
- Dijkstra, T. K., & Henseler, J. (2011). *Linear indices in nonlinear structural equation models: Best fitting proper indices and other composites*. *Quality & Quantity*, 45(6), 1505–1518.
- Dijkstra, T. K., & Henseler, J. (2015). *Consistent partial least squares path modeling*. *MIS Quarterly*, 39(2), 297–316.
- Edwards, J. R., & Bagozzi, R. P. (2000). *On the nature and direction of relationships between constructs and measures*. *Psychological Methods*, 5(2), 155–174.
- Field, John, 2011, *Modal Sosial*, Bantul, Kreasi Wacana
- Fornell, C. G., & Bookstein, F. L. (1982). *Two structural equation models: LISREL and PLS applied to consumer exit-voice theory*. *Journal of Marketing Research*, 19(4), 440–452
- Fukuyama, Francis. 2002. *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Penerbit Qalam
- Fukuyama, F. 2001. *Sosial Capital, Civil Society, and development*. *Third World Quarterly*, 22(1):7-200.
- Frick, JE., Eriksson, LT., Hallen, L. 2012. *Effects of Social Capital on Processes in A Regional Strategic Network*. *Industrial Marketing Management* 41, pp: 800-806

- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grootaert, Cand Bastelaer T. 2001. *Understanding and Measuring Social Capital A Multi Disciplinary Tool For Practitioners*. The World Bank
- Grootaert, Christiaan." Social Capital, Household Welfare And Poverty In Indonesia" 1999. Working papers can be viewed at <http://www.worldbank.org/socialdevelopment>
- Guba E Dan Lincoln, 1981, *Efectiffe Evaluation, San Fransisco, Jossey Bass Publisher*.
- Gutama, 2006, Kebijakan dan Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. 2016. *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Mena, J. A. 2012. *An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research. Journal of the Academy of Marketing Science*, 40(3), 414–433.
- Hair, Joe F. Jr, Marko Sarstedt, Lucas Hopkins, Volker G. Kuppelwieser, 2013, *Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM), An emerging tool in business research. European Business Review*. Vol. 26 No. 2, 2014. pp. 106-121
- Hasbullah, Jousairi. 2006. *Sosial Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR United Press.
- Hayes, A. F. 2013. *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach*. New York: Guilford Press.
- Hayes, A. F., & Scharkow, M. (2013). The relative trustworthiness of inferential tests of the indirect effect in statistical mediation analysis does method really matter?. *Psychological Science*, 24(10), 1918-1927.
- Henseler, J., Dijkstra, T. K., Sarstedt, M., Ringle, C. M., Diamantopoulos, A., Straub, D.W., ... Calantone, R. J. (2014). Common beliefs and reality about partial least squares: Comments on Rönkkö & Evermann (2013). *Organizational Research Methods*, 17(2), 182–209.
- Henseler, J., Hubona, G. S., & Ray, P. A. 2016. Using PLS path modeling in new technology research: Updated guidelines. *Industrial Management & Data Systems*,

- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. 2016. Testing measurement invariance of composites using partial least squares. *International Marketing Review*, 33(3), 405–431.
- Herbert J, Rubin, dan . Rubin, Irene S. 1992. *Community Organization and Development*, 2nd edition. New york : Macmilan Publik. <http://jamu.journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/download/5931/4608>
- Hoyle, R. H., & Kenny, D. A. 1999. Statistical power and tests of mediation. In R. H. Hoyle (Ed.), *Statistical strategies for small sample research*. Newbury Park: Sage
- I.L. Pasiribu. 1986. *Sosiologi Pembangunan*. Tarsito. Bandung
- J.Mawardi M. 2007. Peranan Sosial Capital Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 3 Nomor 2.
- Joe F. Hair & Marko Sarstedt & Christian M. Ringle & Jeannette A. Mena, 2010. An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research. *J. of the Acad. Mark. Sci.*
- Ken Kwong-Kay Wong, 2013, *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Techniques Using SmartPLS*. *Marketing Bulletin*, 2013, 24, Technical Note 1
- Ketimpangan yang Semakin Lebar Ringkasan Ekecutif (dicetak November tahun 2015) www.worldbank.org/id
- Kerlinger, Fred N. 2002. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Khoril Anam dan Agus Suman 2013. *Identifikasi Modal Sosial dalam Kelompok Tani Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Anggota Kelompok Tani* (Studi Kasus pada Kelompok Tani Tebu Ali wafa di desa Rejoyoso Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)
- Krishna, A., dan Uphoff. 1999. Conceptual and Empirical study of Collective Action for Conserving and Developing Watershed in Rajasthan India. *Social Capital Inisiative Working Paper No.13*. The World Bank.
- Liu, J., Qu, H., Huang, D., Chen, G., Yue, X., Zhao, X., Liang, Z. 2014. The Role of Sosial Capital in encouraging Residents' pro-environmental Behaviours in Community Based Ecotourism. *Tourism Management* 41, 190-201
- Lubis, Zulkifli, B., dan Fikarwin Zuska. 2001. Resistensi, Persistensi dan Model Transmisi Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Milik

Bersama, Laporan Penelitian, Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia

Matthew B Miles dan A Michael Huberman, Tjetjep Rohendi Rohidi, 1992

Milligan, S., Fabian, A., Coope, P., dan Errington C. 2006. Family Wellbeing Indicators from the 1981-2001 New Zealand Cencuses. New Zealand: Published in June 2006 by Statistics New Zealand in Conjunction with The University of Auckland and University of Otago. 2006, ISBN 0-478-26982-X

Moeljarto. T, (1993), Politik pembangunan sebuah Analisa Konsep, Arah dan Strategi, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda

Moleong. Lexy. J. 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja

Mudrajad Kuncoro, 1997, Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan, Cetakan pertama, Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta.

Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia Penerbit Qalam. F

North, Douglass.C. 2004. Understanding the Process of Economic Change.Princeton, NJ: Princeton University Press.

North,Douglass. C. 1998. Understanding Institutions. Editor by Menard Claude.2000. Edward Eigar Publishing Limited.

Nunnally,J.C. dan Bernstein 1994. Pyschometrictheory.Edisi ke-3. New York:McGraw-Hill

Nurami M. 2013. *Peran Modal Sosial pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Usaha Daur Ulang di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Sidoarjo)*. Jurnal Penelitian : 1-15,Tersedia di: <http://www.jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/327/274> [diunduh tanggal 17 Oktober 2015, pukul 15:48 WIB].

Nurkse, Ragnar. 1953. *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Oxford Basis Blackwell.

Paul Bullen 2007 , Discussion Paper draft 2a Social capital factors: Plausible theory about causal relationships

Portes, Alejandro. 1998. Sosial Capital: Its Origins and Application in Modern Sociology. Annual Review Sociology, vol. 24: 1-24.

Pranadji T. 2006. Penguatan Modal Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering. Studi Kasus: Desa-desa (Hulu DAS) ex Proyek Bangunan Lahan Kering, Kabupaten Boyolali. Jurnal Agro Ekologi Vol. 24 No.2. [Internet]. [diunduh 10

- September 2014]. Dapat diunduh di:
<http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/JAE%2024-2d.pdf>
- Pretty, J., Smith, D. 2003. Sosial Capital in biodeversity conservation and management. *Consevation Biology* 18, 631-638
- Pretty, J., Ward, H. 2001. Sosial Capital and The Environment. *World Development* Vol. 29, No. 2.
- Primadona. 2012. Penguatan Modal Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan (Kelompok Tani Kecamatan Rambatan). *Jurnal Polibisnis* Vol. 4 No.1. [Internet]. Dapat diunduh di:
<http://ojs.polinpdg.ac.id/index.php/JEB/article/download/645/610>
- Purnomo A, Dharmawan A.H, Agusta I. 2007. Transformasi Struktur Nafkah Pedesaan: Pertumbuhan “Modal Sosial Bentukan” dalam Skema Pengelolaan Hutan Bersama Mayarakat di Kabupaten Kuningan Vol. 1 No.2 [Internet]. : www.skpm.ipb.ac.id/karyailmiah/index.php/studipustaka/article/.../2901/1928
- Putnam, Robert D. 1993. *The Prosperous Community: Sosial Capital and Public Life*. The American Prospect No. 13 Spring
- Putnam, R.D. (1995). Bowling alone: America’s declining social capital. *Journal of Democracy*: 1-8.
- Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. New York: Anchor Books.
- Sharp, R. E. and W. J. Davies. 1989. *Plants Under Stress*. Cambridge University.
- Simon Kuznets, 1955. *The American Economic Review*. Volume XLV March 1955 Number One “Economic Growth and Income Inequality”
- Slamet, Yulius 2010. *Hubungan Antara Institusi Sosial, Modal Sosial, Dan Pengaruhnya Terhadap Pengentasan Kemiskinan*. Phd Thesis, Universiti Utara Malaysia.
- Stiglitz, Joseph E. 2009. “GDP Fetishism.” *Economist’s Voice*, September.
- Stiglitz, Joseph E., Amartya Sen, and Jean-Paul Fitoussi. 2009. “Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.” Paris: Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress
- Strauss, J., Kathleen B., Agus D., Yulia H., Daan P., Elan S., Bondan S., Sukamdi, dan Firman W. 2004. *Indonesian Living Standards: Before and After the Financial Crisis*. RAND Corporation, Santa Monica, USA, and Institute of Southeast-Asian Studies, Singapore.
- Suandi, 2011. *Studi Modal Sosial dan Ketahanan Pangan Keluarga di Daerah Perdesaan Provinsi Jambi*. Proseding Seminar Nasional: Hasil Penelitian

Dosen Pertanian. Volume III, Februari 2011. Jambi: Fakultas Pertanian Universitas Jambi. ISBN: 978-602-97051-4-0.

Sugiyono. 1999. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta

Suharto,Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan kebijakan Sosial*, Bandung:Alfabeta

Sujana Budhiasa,Mahendra Yasa. 2016,"*Social Capital Network And Capabilities As Instruments Of The Poor Household Reduction Strategy: Case Study Of North Bali Province Indonesia*," Voluma 4 No.7 2016

Suparmoko,1996 . "Ekonomika Pembangunan". BPFE, Yogyakarta

Supriatna, Tjahya, 1997, Birokrasi, Pemberdayaan, dan Pengentasan Kemiskinan, Humaniora Utama Press, Bandung.

Tabachnick, B. G., dan Fidell, L.S. 2007. Using Multivariate Statistics. Ed.5. Boston: Perason

Tridico,P. 2013 ." The Impact Of Economic Crisis in the EU Labour A Coparatif Perspective,"*International Labour Review*,152(2) 175-190

Vivian Lowndes, 2001 " *Social Capitaland Local Governance: Exploring the Institutional Design Variable* " Articlein Political Studies Researchgate, University of Nottingham.